

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Data

4.1.1 Deskripsi Objek Penelitian

Tabel 4. 1 Sampel Penelitian

No	Daftar OPD Kota Bandar Lampung	Responden
1	Dinas Perikanan dan Kelautan	10
2	Dinas Pendidikan	10
3	Dinas Pangan	10
4	Dinas Kesehatan	10
5	Dinas Pekerjaan Umum	10
6	Dinas Lingkungan Hidup	10
7	Dinas Pertanian	10
8	Dinas Sosial	10
Jumlah		80

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data Primer yang diperoleh melalui penyebaran kuesioner langsung. Sampel penelitian ini antara lain 8 dinas pada OPD Pemerintah Kota Bandar Lampung dengan menyebarkan 10 kuesioner pada setiap dinas. Berdasarkan hasil penyebaran kusioner berhasil dikumpulkan kembali jawaban kusioner yang diisi lengkap sebanyak 80 kusioner tersebut. Adapun ikhtisar dan pengembalian kusioner pada tabel berikut ini:

Tabel 4. 2 Ikhtisar Distribusi dan Pengembalian Kuesioner

Keterangan	Jumlah	Persentase
Distribusi Kuesioner	80	100 %
Kuesioner Tidak Kembali	0	0 %
Kuesioner Yang Diolah	80	100 %
N Sampel = 80		
Responden Rate = 100 %		

Sumber : data Penelitian diolah, 2020

Dalam proses mendapatkan sampel penelitian dilakukan penyebaran kuesioner pada tanggal 18 Agustus 2020 sampai dengan 18 September 2020 sebanyak 80 kuesioner, dengan Tingkat *respon rate* adalah sebesar 100 %.

4.1.2 Deskripsi Variabel Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan metode *Purposive Sampling* dengan menggunakan kriteria yang telah di tentukan.

Tabel 4. 3 Profil Responden

Kategori	Jumlah	Presentase
Jenis Kelamin		
Laki – laki	23	28,75 %
Perempuan	57	71,25 %
Pendidikan		
SMA/SMK Sederajat	8	10 %
Diploma 3	15	18,75 %
Strata 1	37	46,25 %
Strata 2	20	25 %
Usia		
20 - 30 Tahun	27	33,75 %
31 – 40 Tahun	38	47,5 %
> 40 Tahun	15	18,75 %

Sumber : Data Primer (diolah, 2020)

Pada tabel profil responden memperlihatkan hasil-hasil sebagai berikut:

- a. Berdasarkan kontribusi berdasarkan jenis kelaminnya memperlihatkan, jumlah responden laki-laki sebanyak 28,75 % dan jumlahnya lebih sedikit dibanding jumlah responden perempuan yang berjumlah sebanyak 71,25 %. Hasil ini menggambarkan responden yang bekerja di dinas Kota Bandar Lampung.
- b. Berdasarkan pendidikan terlihat responden yang pendidikan SMA berjumlah 8 responden yaitu 10%, responden yang pendidikan D3 berjumlah 15 responden yaitu 18,75%, responden yang pendidikan S1 berjumlah 37 responden yaitu 46,25%, responden yang pendidikan S2 berjumlah 20 responden yaitu 25% dari total responden.
- c. Berdasarkan kategori umur terlihat responden yang berumur antara 20 sampai 30 tahun berjumlah 27 responden yaitu 33,75%, responden yang berusia antara 31 sampai 40 berjumlah 38 responden yaitu 47,5% dari total responden, responden yang berusia > 40 tahun berjumlah 15 responden yaitu 18,75%.

4.2 Hasil Analisis Data

4.2.1 Uji validitas

Uji Validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner dalam mengukur suatu konstruk, dan apakah dimensi-dimensi yang diukur secara sungguh-sungguh mampu menjadi item-item dalam pengukuran (Ghozali, 2015). Pengujian validitas dilakukan dengan membandingkan nilai r tabel dan r hitung. Jika nilai r tabel < r hitung maka item dikatakan valid dan begitu juga sebaliknya. Nilai r tabel dalam penelitian ini sebesar 0,220 dengan rumus $n-2$ yaitu pada $n= 78$. Nilai uji validitas yang diperoleh dari perhitungan SPSS dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4. 4 Hasil Perhitungan Validitas pada seluruh item Pertanyaan

Variabel	Pertanyaan	Nilai r Hitung	Nilai r Tabel	Keterangan
Akuntabilitas Publik	1	0,637	0,220	Valid
	2	0,630	0,220	Valid
	3	0,636	0,220	Valid

	4	0,721	0,220	Valid
	5	0,662	0,220	Valid
	6	0,607	0,220	Valid
	7	0,622	0,220	Valid
Transparansi Publik	1	0,678	0,220	Valid
	2	0,678	0,220	Valid
	3	0,637	0,220	Valid
	4	0,609	0,220	Valid
	5	0,629	0,220	Valid
	6	0,641	0,220	Valid
Partisipasi Publik	1	0,531	0,220	Valid
	2	0,625	0,220	Valid
	3	0,653	0,220	Valid
	4	0,621	0,220	Valid
	5	0,575	0,220	Valid
	6	0,653	0,220	Valid
Pengawasan	1	0,616	0,220	Valid
	2	0,653	0,220	Valid
	3	0,523	0,220	Valid
	4	0,566	0,220	Valid
	5	0,591	0,220	Valid
	6	0,653	0,220	Valid
Standar Akuntansi Pemerintah	1	0,621	0,220	Valid
	2	0,650	0,220	Valid
	3	0,598	0,220	Valid
	4	0,620	0,220	Valid
	5	0,591	0,220	Valid
	6	0,564	0,220	Valid
	7	0,561	0,220	Valid
Pengelolaan APBD	1	0,565	0,220	Valid
	2	0,655	0,220	Valid

	3	0,564	0,220	Valid
	4	0,611	0,220	Valid
	5	0,565	0,220	Valid
	6	0,617	0,220	Valid

Sumber: Data Primer (diolah, 2020)

Berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan SPSS, Nilai uji validitas yang diperoleh dari perhitungan SPSS ternyata seluruh item pada penelitian ini dinyatakan valid karna nilai r hitung lebih dari 0,220.

4.2.2 Uji Realibilitas

Uji reliabilitas digunakan untuk mengukur konsistensi konstruk atau variabel penelitian. Suatu konstruk atau variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai *Cronbach alpha* lebih besar daripada 0,60 (Ghozali, 2015). Hasil uji reliabilitas keseluruhan variable dalam penelitian ini dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 4. 5 Hasil Perhitungan Reliabilitas Seluruh Variabel

Variabel	<i>Cronbach alpha</i>	Batas Realibilitas	Keterangan
Akuntabilitas Publik	0,764	0,60	Reliabel
Transparansi Publik	0,720	0,60	Reliabel
Partisipasi Publik	0,662	0,60	Reliabel
Pengawasan	0,646	0,60	Reliabel
Standar Akuntansi Pemerintah	0,704	0,60	Reliabel
Pengelolaan APBD	0,636	0,60	Reliabel

Sumber: Data Primer (diolah, 2020)

Hasil pengujian reliabilitas pada Tabel 4.5 di atas menunjukkan bahwa nilai koefisien Alpha dari variabel - variabel yang diteliti menunjukkan hasil yang beragam dan variabel menghasilkan nilai *Cronbach Alpha* lebih besar dari 0,60. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah reliabel.

4.3 Analisis Statistik Deskriptif

Tabel 4. 6 Hasil Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Akuntabilitas Publik	80	1	5	4.47	.873
Transparansi Publik	80	1	5	4.28	.864
Partisipasi Publik	80	1	5	4.17	.933
Pengawasan	80	1	5	4.18	.893
Standar Akuntansi Pemerintah	80	1	5	4.19	.911
Pengelolaan APBD	80	1	5	4.20	.923
Valid N (listwise)	80				

Sumber: Data Primer (diolah, 2020)

Berdasarkan tabel di atas untuk masing – masing variabel yaitu: untuk variabel Akuntabilitas Publik diketahui jawaban maksimum adalah 5, dan jawaban terendah 1, dengan rata-rata jawaban adalah 4,47 dan Std. Deviation 0,873. Sedangkan untuk variabel Transparansi Publik diketahui jawaban maksimum adalah 5 dan jawaban terendah 1, dengan rata-rata jawaban adalah 4,28 dan Std. Deviation 0,864. Sedangkan untuk variabel Partisipasi Publik diketahui jawaban maksimum adalah 5 dan jawaban terendah 1, dengan rata-rata jawaban adalah 4,17 dan Std. Deviation 0,933. Sedangkan untuk variabel Pengawasan diketahui jawaban maksimum adalah 5 dan jawaban terendah 1, dengan rata-rata jawaban adalah 4,18 dan Std. Deviation 0,893. Sedangkan untuk variabel Standar Akuntansi Pemerintah diketahui jawaban maksimum adalah 5 dan jawaban terendah 1, dengan rata-rata jawaban adalah 4,19 dan Std. Deviation 0,911. serta untuk variabel Pengelolaan APBD diketahui jawaban maksimum adalah 5, dan jawaban terendah adalah 1 sedangkan rata-rata jawaban adalah 4,20 dan Std. Deviation 0,923.

4.4 Uji Asumsi Klasik

4.4.1 Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan menguji apakah dalam model penelitian variabel terdistribusi secara normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah model

regresi yang memiliki distribusi nilai residual normal atau mendekati normal dengan Nilai sig kolmogorov-Sminorv variabel lebih besar ($>$) $\alpha = 0,05$. Hasil uji normalitas dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4. 7 Hasil Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		80
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	0E-7
	Std. Deviation	2.09238702
	Absolute	.076
Most Extreme Differences	Positive	.071
	Negative	-.076
Kolmogorov-Smirnov Z		.683
Asymp. Sig. (2-tailed)		.740

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Sumber: Data Primer (diolah, 2020)

Hasil uji normalitas dengan menggunakan *kolomogrov-smirnov* yang dipaparkan pada tabel diatas menunjukkan bahwa dependen K-Z sebesar 0,683 dengan tingkat signifikan sebesar 0,740. Dari hasil tersebut dapat dilihat bahwa angka signifikan (Sig) untuk variabel dependen pada uji *kolomogrov-smirnov* diperoleh $0,740 > 0,05$ artinya sampel terdistribusi secara normal.

4.4.2 Uji Multikolinieritas

Uji Multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen).

Hasil uji multikolinieritas dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4. 8 Hasil Uji Multikolinieritas

Coefficients ^a							
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
(Constant)	3.152	2.111		1.494	.139		
1 Akuntabilitas Publik	.363	.111	.432	3.280	.002	.308	3.251
Transparansi Publik	.057	.119	.058	.480	.633	.364	2.745
Partisipasi Publik	.168	.104	.174	1.617	.110	.459	2.178
Pengawasan	.199	.131	.194	1.515	.134	.325	3.076

Dependent Variable: Pengelolaan APBD

Sumber: Data Primer (diolah, 2020)

Berdasarkan hasil uji pada tabel diatas diketahui bahwa variabel Akuntabilitas Publik memiliki nilai tolerance sebesar 0,308 dan nilai VIF sebesar 3,251, sedangkan variabel Transparansi Publik memiliki nilai tolerance sebesar 0,364 dan nilai VIF sebesar 2.745, untuk variabel Partisipasi Publik memiliki nilai tolerance sebesar 0,459 dan nilai VIF sebesar 2,178, dan pada variabel Pengawasan memiliki nilai tolerance sebesar 0,325 dan nilai VIF sebesar 3,076. Dari hasil diatas diperoleh kesimpulan bahwa seluruh nilai VIF disemua variabel penelitian lebih kecil dari 10. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terdapat masalah multikolinieritas dalam model regresi.

4.4.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan lainnya tetap maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Hasil uji heteroskedastisitas menggunakan uji glejser dapat dilihat pada gambar berikut ini :

Tabel 4. 9 Hasil Uji Heteroskedatisitas

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	2.538	1.115		2.276	.026
1 Akuntabilitas Publik	-.051	.058	-.178	-.868	.388
Transparansi Publik	-.008	.063	-.023	-.120	.905
Partisipasi Publik	.052	.055	.159	.944	.348
Pengawasan	-.012	.069	-.034	-.172	.864

Dependent Variable: ares

Sumber: Data Primer (diolah, 2020)

Berdasarkan dari tabel diatas terlihat bahwa variabel Akuntabilitas publik, Transparansi publik, Partisipasi publik, dan Pengawasn memiliki nilai signifikan $> 0,05$ (0,388; 0,905; 0,348; 0,864 $> 0,05$) yang artinya bahwa semua variabel memenuhi syarat terhindar dari heteroskedatisitas.

4.5 Pengujian Hipotesis

4.5.1 Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis Regresi Linear Berganda didasari pada hubungan fungsional maupun hubungan kausal dari dua atau lebih variabel independen dengan satu variabel dependen. Analisis regresi ganda dilakukan bila jumlah variabel independennya terdapat minimal 2 (dua). Hasil persamaan regresi linier berganda dapat dilihat pada gambar berikut ini :

Tabel 4. 10 Hasil Persamaan Regresi Linier Berganda

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	3.152	2.111		1.494	.139
1 Akuntabilitas Publik	.363	.111	.432	3.280	.002
Transparansi Publik	.057	.119	.058	.480	.633
Partisipasi Publik	.168	.104	.174	1.617	.110
Pengawasan	.199	.131	.194	1.515	.134

Dependent Variable: Pengelolaan APBD

Sumber: Data Primer (diolah, 2020)

dari tabel 4.13 diatas dapat disusun persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = a + \beta_1X_1 + \beta_2X_2 + \beta_3X_3 + \beta_4X_4$$

$$Y = 3,152 + 0,363X_1 + 0,057X_2 + 0,168X_3 + 0,199X_4$$

artinya adalah:

- Nilai $a = 3,152$ artinya jika X_1 , X_2 , X_3 dan X_4 , nilainya 0, maka Y (Pengelolaan APBD) nilainya adalah 3,152. Dengan kata lain jika Akuntabilitas publik, Transparansi publik, Partisipasi publik, dan Pengawasan bernilai nol, maka Y (Pengelolaan APBD) nilainya adalah 3,152.
- Koefisien regresi variabel X_1 (Akuntabilitas Publik) sebesar 0,363; artinya jika nilai X_1 (Akuntabilitas Publik) mengalami kenaikan 1 maka Y (Pengelolaan APBD) akan mengalami kenaikan sebesar 0,363.
- Koefisien regresi variabel X_2 (Transparansi Publik) sebesar 0,057; artinya jika nilai X_2 (Transparansi Publik) mengalami kenaikan 1 maka Y (Pengelolaan APBD) akan mengalami kenaikan sebesar 0,057.
- Koefisien regresi variabel X_3 (Partisipasi Publik) sebesar 0,168; artinya jika nilai X_3 (Partisipasi Publik) mengalami kenaikan 1 maka Y (Pengelolaan APBD) akan mengalami kenaikan sebesar 0,168.
- Koefisien regresi variabel X_4 (Pengawasan) sebesar 0,199; artinya jika nilai X_4 (Pengawasan) mengalami kenaikan 1 maka Y (Pengelolaan APBD) akan mengalami kenaikan sebesar 0,199.

Sedangkan angka koefisien korelasi dan koefisien determinasi dapat dilihat pada tabel *Model Summary* sebagai berikut:

Tabel 4. 11 Model Summary

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.775 ^a	.601	.579	2.147

a. Predictors: (Constant), Pengawasan, Partisipasi Publik, Transparansi Publik, Akuntabilitas Publik

Dependent Variable: Pengelolaan APBD

Sumber: Data Primer (diolah, 2020)

pedoman untuk memberikan interpretasi koefisien korelasi sebagai berikut:

- 0,00 – 0,199 = sangat rendah
- 0,20 – 0,399 = rendah
- 0,40 – 0,599 = sedang
- 0,60 – 0,799 = tinggi
- 0,80 – 1,000 = sangat tinggi

Dari hasil olah data (output) diperoleh nilai Koefisien korelasi (R) sebesar 0,775, maka dapat disimpulkan bahwa terjadi hubungan yang masuk kategori tinggi antara Akuntabilitas publik, Transparansi publik, Partisipasi Publik dan Pengawasan terhadap Pengelolaan APBD di Pemerintah Kota Bandar Lampung. Dan dilihat dari nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,601 atau 60,1 % maka dapat dikatakan bahwa persentase sumbangan pengaruh variabel independen (Akuntabilitas Publik, Transparansi Publik, Partisipasi Publik dan Pengawasan) terhadap variabel dependen Pengelolaan APBD sebesar 60,1 % sedangkan sisanya sebesar 39,9 % dipengaruhi atau dijelaskan oleh faktor lain yang tidak dimasukkan dalam model ini.

4.5.2 Uji Kelayakan Model

Uji F digunakan untuk melihat apakah model dalam penelitian layak atau tidak digunakan dalam menganalisis riset yang dilakukan. Hasil tabel F dalam

penelitian sebagai berikut:

Tabel 4. 12 Anova

ANOVA ^a						
Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.	
1	Regression	520.319	4	130.080	28.207	.000 ^b
	Residual	345.869	75	4.612		
	Total	866.187	79			

a. Dependent Variable: Pengelolaan APBD

Predictors: (Constant), Pengawasan, Partisipasi Publik, Transparansi Publik, Akuntabilitas Publik
Sumber: Data Primer (diolah, 2020)

Berdasarkan tabel diatas diperoleh hasil koefisien signifikan menunjukkan bahwa nilai signifikan sebesar $0,000 < 0,05$ dengan nilai F sebesar 28,207 yang artinya bahwa Model Layak.

4.5.3 Uji Hipotesis

Uji t digunakan untuk menjawab hipotesis yang disampaikan dalam penelitian anda. Adapun kesimpulan hipotesis sebagai berikut:

Ha diterima dan Ho ditolak apabila $t \text{ hitung} > t \text{ tabel}$ atau $\text{Sig} < 0,05$

Ha ditolak dan Ho diterima apabila $t \text{ hitung} < t \text{ tabel}$ atau $\text{Sig} > 0,05$

Hasil Uji t dalam penelitian sebagai berikut:

Tabel 4. 13 Coefficients

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	3.152	2.111		1.494	.139
	Akuntabilitas Publik	.363	.111	.432	3.280	.002
	Transparansi Publik	.057	.119	.058	.480	.633
	Partisipasi Publik	.168	.104	.174	1.617	.110
	Pengawasan	.199	.131	.194	1.515	.134

Dependent Variable: Pengelolaan APBD

Sumber: Data Primer (diolah, 2020)

a. Hasil untuk variabel Akuntabilitas Publik (X1) menunjukkan bahwa dengan

signifikan $0,002 < 0,05$ maka jawaban hipotesis yaitu H_{a1} diterima dan menolak H_{o1} yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh Akuntabilitas Publik terhadap Pengelolaan APBD pada Pemerintah Kota Bandar Lampung

- b. Hasil untuk variabel Transparansi Publik (X_2) menunjukkan bahwa dengan signifikan $0,633 > 0,05$ maka jawaban hipotesis yaitu H_{a2} ditolak dan menerima H_{o2} yang menyatakan bahwa tidak terdapat pengaruh Transparansi Publik terhadap Pengelolaan APBD pada Pemerintah Kota Bandar Lampung.
- c. Hasil untuk variabel Partisipasi Publik (X_3) menunjukkan bahwa dengan signifikan $0,110 > 0,05$ maka jawaban hipotesis yaitu H_{a2} ditolak dan menerima H_{o2} yang menyatakan bahwa tidak terdapat pengaruh Partisipasi Publik terhadap Pengelolaan APBD pada Pemerintah Kota Bandar Lampung.
- d. Hasil untuk variabel Pengawasan (X_4) menunjukkan bahwa dengan signifikan $0,134 > 0,05$ maka jawaban hipotesis yaitu H_{a2} ditolak dan menerima H_{o2} yang menyatakan bahwa tidak terdapat pengaruh Pengawasan terhadap Pengelolaan APBD pada Pemerintah Kota Bandar Lampung.

4.5.4 Uji Moderate Regression Analysis (MRA)

Pengujian hipotesis moderasi dalam penelitian ini menggunakan Moderate Regression Analysis (MRA). Metode ini dilakukan dengan menambahkan variabel perkalian antara variabel bebas dengan variabel moderatingnya.

Tabel 4. 14 Coefficients MRA

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	2.124	2.611		.813	.419
Akuntabilitas Publik	-2.629	1.835	-3.127	-1.433	.156
Transparansi Publik	2.820	1.924	2.856	1.465	.147
Partisipasi Publik	-.129	1.255	-.133	-.102	.919
1 Pengawasan	1.366	2.263	1.331	.603	.548
$X_1 * X_5$.100	.061	4.925	1.631	.107
$X_2 * X_5$	-.092	.064	-3.897	-1.431	.157
$X_3 * X_5$.009	.043	.388	.213	.832
$X_4 * X_5$	-.037	.074	-1.506	-.493	.624

- a. Dependent Variable: Pengelolaan APBD
Sumber: Data Primer (diolah, 2020)

Dari tabel diatas dapat disusun persamaan sebagai berikut :

$$Y = a + \beta_1X_1 + \beta_2X_2 + \beta_3X_3 + \beta_4X_4 + \beta_5X_1*X_5 + \beta_6X_2*X_5 + \beta_7X_3*X_5 + \beta_8X_4*X_5 + \varepsilon$$

$$Y = 2,124 - 2,629X_1 + 2,820X_2 - 0,129X_3 + 1,366X_4 + 0,100X_1*X_5 - 0,092X_2*X_5 + 0,009X_3*X_5 - 0,037X_4*X_5$$
 artinya:

- a. Nilai $b_0 = 2,124$ artinya jika variabel independent nilainya 0, maka Y (Pengelolaan APBD) nilainya adalah 2,124. Dengan kata lain jika $X_1, X_2, X_3, X_4, X_1*X_5, X_2*X_5, X_3*X_5$ dan X_4*X_5 bernilai nol, maka Y (Pengelolaan APBD) nilainya adalah 2,124.
- b. Koefisien regresi variabel X_1 (Akuntabilitas Publik) sebesar -2,629; artinya jika nilai X_1 (Akuntabilitas Publik) mengalami kenaikan sebesar 1 satuan maka Y (Pengelolaan APBD) akan mengalami penurunan sebesar 2,629, dengan asumsi variabel lain tetap.
- c. Koefisien regresi variabel X_2 (Transparansi Publik) sebesar 2,820; artinya jika nilai X_2 (Transparansi Publik) mengalami kenaikan sebesar 1 satuan maka Y (Pengelolaan APBD) akan mengalami kenaikan sebesar 2,820, dengan asumsi variabel lain tetap.
- d. Koefisien regresi variabel X_3 (Partisipasi Publik) sebesar -0,129; artinya jika nilai X_3 (Partisipasi Publik) mengalami kenaikan sebesar 1 satuan maka Y (Pengelolaan APBD) akan mengalami penurunan sebesar 0,129, dengan asumsi variabel lain tetap.
- e. Koefisien regresi variabel X_4 (Pengawasan) sebesar 1,366; artinya jika nilai X_4 (Pengawasan) mengalami kenaikan sebesar 1 satuan maka Y (Pengelolaan APBD) akan mengalami kenaikan sebesar 1,366, dengan asumsi variabel lain tetap.
- f. Koefisien regresi variabel X_1*X_5 (Akuntabilitas Publik dengan Standar Akuntansi Publik sebagai moderasi) sebesar -0,037; artinya jika nilai X_1*X_5 (Akuntabilitas Publik dengan Standar Akuntansi Pemerintah sebagai moderasi) mengalami kenaikan sebesar 1 satuan maka Y (Pengelolaan APBD)

akan mengalami penurunan sebesar 0,037, dengan asumsi variabel lain tetap.

- g. Koefisien regresi variabel $X_2 \times X_5$ (Transparansi Publik dengan Standar Akuntansi Publik sebagai moderasi) sebesar -0,092; artinya jika nilai $X_2 \times X_5$ (Transparansi Publik dengan Standar Akuntansi Pemerintah sebagai moderasi) mengalami kenaikan sebesar 1 satuan maka Y (Pengelolaan APBD) akan mengalami penurunan sebesar 0,092, dengan asumsi variabel lain tetap.
- h. Koefisien regresi variabel $X_3 \times X_5$ (Partisipasi Publik dengan Standar Akuntansi Publik sebagai moderasi) sebesar 0,009; artinya jika nilai $X_3 \times X_5$ (Partisipasi Publik dengan Standar Akuntansi Pemerintah sebagai moderasi) mengalami kenaikan sebesar 1 satuan maka Y (Pengelolaan APBD) akan mengalami kenaikan sebesar 0,009, dengan asumsi variabel lain tetap.
- i. Koefisien regresi variabel $X_4 \times X_5$ (Pengawasan dengan Standar Akuntansi Publik sebagai moderasi) sebesar 0,100; artinya jika nilai $X_4 \times X_5$ (Pengawasan dengan Standar Akuntansi Pemerintah sebagai moderasi) mengalami kenaikan sebesar 1 satuan maka Y (Pengelolaan APBD) akan mengalami kenaikan sebesar 0,100, dengan asumsi variabel lain tetap.

Sedangkan angka koefisien korelasi dan koefisien determinasi dapat dilihat pada tabel Model Summary sebagai berikut:

Tabel 4. 15 Model Summary

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.788 ^a	.620	.577	2.153

a. Predictors: (Constant), $X_4 \times X_5$, Partisipasi Publik, Transparansi Publik, Akuntabilitas Publik, Pengawasan, $X_3 \times X_5$, $X_2 \times X_5$, $X_1 \times X_5$
 Sumber: Data Primer (diolah, 2020)

Dari hasil olah data (output) diperoleh nilai Koefisien korelasi (R) sebesar 0,788, maka dapat disimpulkan bahwa terjadi hubungan yang masuk kategori sangat tinggi antara $X_1, X_2, X_3, X_4, X_1 \times X_5, X_2 \times X_5, X_3 \times X_5$ dan $X_4 \times X_5$ terhadap Y

(Pengelolaan APBD) pada Pemerintah Kota Bandar Lampung. Dan dilihat dari nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,620 atau 62% maka dapat dikatakan bahwa persentase sumbangan pengaruh variabel independen $X_1, X_2, X_3, X_4, X_1 * X_5, X_2 * X_5, X_3 * X_5$ dan $X_4 * X_5$ terhadap variabel dependen Y (Pengelolaan APBD) sebesar 62% sedangkan sisanya sebesar 38% dipengaruhi atau dijelaskan oleh faktor lain yang tidak dimasukkan dalam model ini.

Hasil Uji t dalam penelitian sebagai berikut:

Tabel 4. 16 Uji T MRA

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	2.124	2.611		.813	.419
Akuntabilitas Publik	-2.629	1.835	-3.127	-1.433	.156
Transparansi Publik	2.820	1.924	2.856	1.465	.147
Partisipasi Publik	-.129	1.255	-.133	-.102	.919
1 Pengawasan	1.366	2.263	1.331	.603	.548
$X_1 * X_5$.100	.061	4.925	1.631	.107
$X_2 * X_5$	-.092	.064	-3.897	-1.431	.157
$X_3 * X_5$.009	.043	.388	.213	.832
$X_4 * X_5$	-.037	.074	-1.506	-.493	.624

b. Dependent Variable: Pengelolaan APBD

Sumber: Data Primer (diolah, 2020)

- a. Hasil untuk variabel Akuntabilitas Publik dengan Standar Akuntansi Pemerintah sebagai moderasi ($X_1 * X_5$) menunjukkan bahwa dengan signifikan $0,107 > 0,05$, yang artinya menyatakan bahwa tidak terdapat pengaruh Akuntabilitas Publik dengan Standar Akuntansi Pemerintah sebagai moderasi terhadap Pengelolaan APBD pada Pemerintah Kota Bandar Lampung.
- b. Hasil untuk variabel Transparansi Publik dengan Standar Akuntansi Pemerintah sebagai moderasi ($X_2 * X_5$) menunjukkan bahwa dengan signifikan $0,157 > 0,05$, yang artinya menyatakan bahwa tidak terdapat pengaruh Transparansi Publik dengan Standar Akuntansi Pemerintah sebagai moderasi terhadap Pengelolaan APBD pada Pemerintah Kota Bandar Lampung.

- c. Hasil untuk variabel Partisipasi Publik dengan Standar Akuntansi Pemerintah sebagai moderasi (X3*X5) menunjukkan bahwa dengan signifikan $0,832 > 0,05$, yang artinya menyatakan bahwa tidak terdapat pengaruh Partisipasi Publik dengan Standar Akuntansi Pemerintah sebagai moderasi terhadap Pengelolaan APBD pada Pemerintah Kota Bandar Lampung.
- d. Hasil untuk variabel Pengawasan dengan Standar Akuntansi Pemerintah sebagai moderasi (X4*X5) menunjukkan bahwa dengan signifikan $0,624 > 0,05$, yang artinya menyatakan bahwa tidak terdapat pengaruh Pengawasan dengan Standar Akuntansi Pemerintah sebagai moderasi terhadap Pengelolaan APBD pada Pemerintah Kota Bandar Lampung.

4.6 Pembahasan

Penelitian ini telah berhasil membuktikan tentang pengaruh akuntabilitas publik, transparansi publik, partisipasi publik, pengawasan, akuntabilitas publik dengan standar akuntansi pemerintah sebagai variabel moderasi, transparansi publik standar akuntansi pemerintah sebagai variabel moderasi, partisipasi publik standar akuntansi pemerintah sebagai variabel moderasi, pengawasan standar akuntansi pemerintah sebagai variabel moderasi, terhadap pengelolaan APBD pada Pemerintah Kota Bandar Lampung. Adapun hasil pengujian tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

4.6.1 Pengaruh Akuntabilitas Publik Terhadap Pengelolaan APBD

Berdasarkan hasil uji regresi pada tabel 4.13 maka dapat dikatakan bahwa Akuntabilitas Publik berpengaruh secara signifikan terhadap Pengelolaan APBD pada Pemerintah Kota Bandar Lampung. Artinya hipotesis diterima hal ini menunjukkan bahwa instrumen akuntabilitas publik dalam pemerintahan sudah dilaksanakan yaitu akuntabilitas kejujuran dan hukum, akuntabilitas manajerial, akuntabilitas program, akuntabilitas kebijakan, dan akuntabilitas finansial.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian Sopamah dan Isa Wahyudi (2004) yang menyatakan bahwa Akuntabilitas publik berpengaruh secara signifikan terhadap pengelolaan APBD. Menurut Mardiasmo (2006) Akuntabilitas adalah kewajiban

pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggung jawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggung jawaban tersebut.

4.6.2 Pengaruh Transparansi Publik Terhadap Pengelolaan APBD

Berdasarkan hasil uji regresi pada tabel 4.13 maka dapat dikatakan bahwa Transparansi Publik tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Pengelolaan APBD pada Pemerintah Kota Bandar Lampung. Artinya hipotesis ditolak hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Bandar Lampung belum memberikan informasi yang terbuka kepada masyarakat terhadap pengelolaan APBD, pemerintah belum proaktif memberikan informasi lengkap tentang kebijakan dan layanan. Sementara masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pengelolaan APBD yang diamanatkan kepada pemerintah sesuai undang undang.

Mardiasmo (2006). Transparansi dibangun atas dasar kebebasan dalam memperoleh informasi. Informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik secara langsung dapat diperoleh bagi siapapun yang membutuhkan. Transparansi bermakna memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan dan ditaati dalam peraturan perundang-undangan.

Penelitian ini tidak sejalan dengan peneliti sebelumnya Yeni Mutia Basri (2008) yang menyatakan bahwa transparansi publik berpengaruh secara signifikan terhadap pengelolaan APBD. Dapat disimpulkan tidak transparansi nya pengelolaan APBD menyebabkan tidak tercapainya pelayanan publik yang baik, sehingga pengelolaan APBD masih boros, tidak adil, dan tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

4.6.3 Pengaruh Partisipasi Publik Terhadap Pengelolaan APBD

Berdasarkan hasil uji regresi pada tabel 4.13 maka dapat dikatakan bahwa Partisipasi Publik tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Pengelolaan APBD pada Pemerintah Kota Bandar Lampung. Artinya hipotesis ditolak hal ini menunjukkan bahwa publik atau masyarakat Bandar Lampung belum mendapatkan ruang untuk ikut berpartisipasi dalam memberikan kritik saran dalam perencanaan maupun pelaksanaan pengelolaan APBD sehingga masih sering terjadi kebijakan-kebijakan yang kurang tepat sasaran.

Utami dan Efrizal (2013) menyatakan bahwa ada tiga peran penting parlemen dalam proses anggaran yaitu mewakili kepentingan masyarakat, memberdayakan pemerintah dan mengawasi kinerja pemerintah. Salah satu efek positif adanya partisipasi masyarakat adalah pertukaran informasi yang efektif. Untuk menciptakan akuntabilitas kepada publik diperlukan partisipasi pimpinan instansi dan warga masyarakat dalam penyusunan dan pengawasan anggaran. DPRD sebagai lembaga legislatif daerah memiliki tugas dan fungsinya sebagai penyalur aspirasi masyarakat. Konsekuensinya DPRD harus mengerti fungsinya, mengerti rakyat, mengerti aspirasinya dan masalah dan kepentingan yang dihadapinya. Kualitas pemahaman anggota dewan terhadap fungsi dan aspirasi rakyat tersebut menuntut DPRD untuk memiliki pengetahuan, kemampuan, kecakapan, dan keterampilan yang luas dan mendalam.

Penelitian ini tidak sejalan dengan peneliti sebelumnya Rosy Oktasary (2016) yang menyatakan bahwa partisipasi publik berpengaruh secara signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah (APBD) di DPRD kabupaten Karanganyar. Seperti yang kita tahu bahwa partisipasi publik juga merupakan hal yang penting dilakukan dalam pengelolaan APBD, mengingat tujuan dari adanya APBD ini adalah untuk mensejahterakan masyarakat. Sehingga partisipasi Publik ini seharusnya dilaksanakan sebagai upaya untuk mempersiapkan masyarakat agar lebih mandiri, dan kebijakan yang lebih tepat sasaran. Dalam hal ini publik diwakili oleh dewan sebagai penyalur aspirasi masyarakat. Dan dewan yang bertugas untuk melakukan penjangkaran aspirasi untuk selanjutnya disampaikan ke pemerintah sebagai pemegang amanah rakyat.

4.6.4 Pengaruh Pengawasan Terhadap Pengelolaan APBD

Berdasarkan hasil uji regresi pada tabel 4.13 maka dapat dikatakan bahwa Pengawasan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Pengelolaan APBD pada Pemerintah Kota Bandar Lampung. Artinya hipotesis ditolak hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan APBD pada Pemerintah Kota Bandar Lampung belum mendapatkan pengawasan yang sesuai dari pihak internal maupun eksternal. Sehingga pengelolaan APBD menyebabkan tidak tercapainya pelayanan publik yang baik sehingga kebijakan kebijakan masih banyak yang kurang adil dan merata serta tidak sesuai kebutuhan masyarakat.

Menurut Halim (2002) pengertian pengawasan APBD adalah segala kegiatan untuk menjamin agar pengumpulan pendapatan-pendapatan daerah, dan pengeluaran daerah berjalan sesuai dengan rencana, aturan-aturan dan tujuan yang telah ditetapkan. Keputusan Presiden No. 74 tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, pasal (16) menyebutkan bahwa pengawasan pemerintah daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintah daerah berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengawasan merupakan tahap integral dengan keseluruhan tahap pada penyusunan dan pelaporan APBD.

Penelitian ini tidak sejalan dengan peneliti sebelumnya Septi Mayasari (2017) yang menyatakan bahwa pengawasan berpengaruh secara signifikan terhadap pengelolaan APBD. Pengawasan internal adalah pengawasan yang dilakukan oleh pimpinan atau atasan langsung suatu organisasi terhadap kinerja bawahan dengan tujuan untuk mengetahui atau menilai apakah kerja yang telah ditetapkan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan pengawasan fungsional adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawasan fungsional baik yang berasal dari internal pemerintah maupun dari eksternal pemerintah. Pengawasan yang dilakukan oleh Dewan dapat

berupa pengawasan secara langsung dan tidak langsung serta preventif dan represif.

4.6.5 Pengaruh Akuntabilitas Publik, Transparansi Publik, Partisipasi Publik dan Pengawasan Terhadap Pengelolaan APBD dengan Standar Akuntansi Pemerintah sebagai Variabel Moderasi

Berdasarkan hasil uji regresi pada tabel 4.16, maka dapat dikatakan bahwa akuntabilitas publik, transparansi publik, partisipasi publik dan pengawasan dengan Standar Akuntansi Pemerintah sebagai variabel moderasi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Pengelolaan APBD pada Pemerintah Kota Bandar Lampung.

Artinya hipotesis ditolak hal ini menunjukkan bahwa tidak adanya hubungan standar akuntansi pemerintah dengan akuntabilitas publik, transparansi publik, partisipasi publik, dan pengawasan terhadap pengelolaan APBD. Dari hasil uji t dan uji signifikan parameter individu diperoleh hasil signifikan jauh diatas ketentuan, yang artinya bahwa standar akuntansi pemerintah tidak dapat memperkuat atau memperlemah hubungan variabel akuntabilitas publik, transparansi publik, partisipasi publik dan pengawasan dengan pengelolaan APBD.

Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Dengan demikian SAP merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah Indonesia. Salah satu upaya untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Negara/Daerah adalah penyampaian laporan pertanggung jawaban keuangan pemerintah yang telah diterima secara umum. Hal tersebut diatur dalam Undang-Undang No.17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara yang mensyaratkan bentuk dan isi laporan pertanggung jawaban pelaksanaan APBN/APBD disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah.

Penelitian ini tidak sejalan dengan peneliti sebelumnya Liper Siregar (2011) yang menyatakan bahwa standar akuntansi pemerintah mampu memoderasi pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Pengelolaan keuangan dipertanggung jawabkan sesuai dengan baik dan buruk karena Ada atau tidaknya akuntabilitas publik, transparansi publik, partisipasi publik, dan pengawasan terhadap pengelolaan APBD tidak memiliki hubungan dengan standar akuntansi pemerintah. Maka disimpulkan standar akuntansi pemerintah belum bisa disebut sebagai variabel moderasi antara akuntabilitas publik, transparansi publik, partisipasi publik, dan pengawasan dengan pengelolaan APBD dipemerintah Kota Bandar Lampung.